



**RANCANGAN TEKNOKRATIK**

# **RPJMK**

# **2025-2029**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA LHOKEUMAWE**



[www.bappeda.lhokseumawekota.go.id](http://www.bappeda.lhokseumawekota.go.id)



[bappedakotalhokseumawe](https://www.instagram.com/bappedakotalhokseumawe)



# DASAR HUKUM

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NO 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RPJPD  
2025-2045

**Diktum ketujuh:**

Rancangan RPJPD th 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pilkada 2024

**PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**PASAL 1** Bahwa **RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD** adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

**PASAL 8** Menegaskan bahwa **PENDEKATAN TEKNOKRATIK** dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan **METODE DAN KERANGKA BERPIKIR ILMIAH** untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**PASAL 42** Penyusunan **RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD**, diselesaikan paling lambat **SEBELUM PENETAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**.

**PASAL 43** Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah.

**PASAL 45 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD** dibahas **TIM PENYUSUN** bersama dengan **PERANGKAT DAERAH** untuk memperoleh **MASUKAN DAN SARAN** sesuai dengan **TUGAS DAN FUNGSI** perangkat daerah.



# VISI RPJP 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045	Visi Provinsi Aceh	Visi Kota Lhokseumawe
Negara Nusantara Berdaulat Maju Berkelanjutan	Aceh Maju, Sejahtera Berotonomi Khusus Islami dan Berkelanjutan	Lhokseumawe Islami Mandiri, Maju Berkelanjutan

## Pokok Visi RPJPK Lhokseumawe 2025-2045

### Islami

- Adalah seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan atau melaksanakan aktivitas berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, pendidikan Islami dan pengamalan ajaran islam secara konsisten.

### Mandiri

- Adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembiayaan Pembangunan.

### Maju

- Adalah suatu kondisi ditandai dengan kualitas sumber daya manusia semakin baik, tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingginya pendapatan dan pemerataan ekonomi, penguasaan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi serta memiliki sistem tata Kelola dan kelembagaan pemerintahan dan politik termasuk hukum yang mantap

### Berkelanjutan

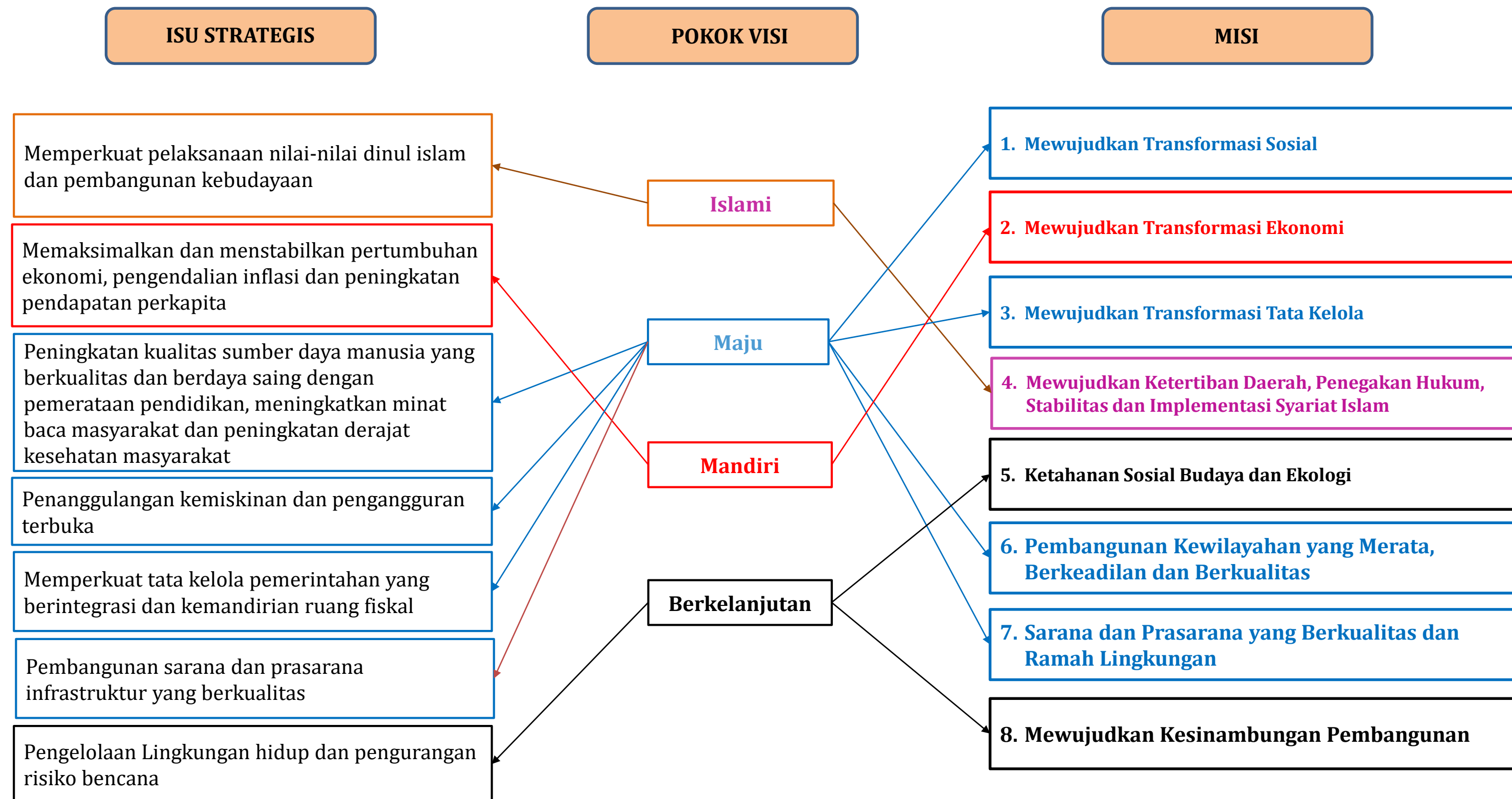
- Adalah terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim serta ketangguhan sosial, budaya dan ekonomi.

# 8 Misi Kota Lhokseumawe 2025-2045



- 1 Mewujudkan transformasi sosial;
- 2 Mewujudkan transformasi ekonomi;
- 3 Mewujudkan transformasi tata kelola ;
- 4 Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam ;
- 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ;
- 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;
- 7 Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 8 Kestinambungan Pembangunan;

# Isu Strategis, Pokok Visi, & Misi RPJP 2025-2045



# TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPK LHOKSEUMAWE 2025-2045



AKSELERASI TRANSFORMASI  
PEMBANGUNAN 2030-2034  
(RPJMK TAHAP – II)

PEMANTAPAN CAPAIAN  
PEMBANGUNAN 2040-2045  
(RPJMK TAHAP IV)

TAHAPAN - I



PENGUATAN MODAL DASAR  
2025-2029  
(RPJMK TAHAP – I)

TAHAPAN - II



EKSPANSI DAN TRANSFORMASI  
DIGITAL 2035-2039  
(RPJMK TAHAP – III)

TAHAPAN - III



TAHAPAN - IV





# PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

*“kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat”*

## **Makro:**

- Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh, dan Pemajuan Kebudayaan;
- Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Belum Maksimal, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional; (BPS, Lhoks = 4,21%; Aceh = 4,23%; Nas = 5,04%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka Lhokseumawe Masih Tinggi, berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional; (BPS, Lhoks = 8,78%; Aceh = 6,03%; Nas = 5,32%)
- Rasio Pajak terhadap PDRB Masih Sangat Minim dan Berfluktuasi;
- Masih Tingginya Ketergantungan Pembiayaan Pembangunan terhadap Dana Pemerintah Pusat; (DAU 58,28%; DAK 12,66%; DD 8,20%)
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih berfluktuasi, masih berada di bawah rata-rata TPAK Aceh; (BPS, Lhoks = 64,36%; Aceh = 64,77%)
- Angka Kemiskinan Masih berada di Atas rata-rata Nasional; (BPS, Lhoks = 10,73%; Aceh = 14,45%; Nas = 9,36%).
- Prevalansi Stunting masih belum memenuhi Target Nasional; (Lhoks 20,70%; Aceh 29,40%; Nas 21,5%)
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Optimal; (IKLH 63,4 predikat Sedang).

***Permasalahan Secara Detail/Sektoral dapat dilihat dalam Dokumen.***

# TAHAPAN dan TATA CARA PENYUSUNAN Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

- a. **BAPPEDA** bertanggungjawab menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai peraturan yang berlaku;
- b. **Perangkat Daerah memberikan informasi terhadap capaian indikator kinerja (periode 2019-2023), permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi saat ini dan 5 tahun yang akan datang;**
- c. **BAPPEDA** melakukan Pembahasan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dengan **SKPD** untuk menyerap saran dan/atau masukan;
- d. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 disempurnakan berdasarkan **Berita Acara Kesepakatan (BAK)** hasil pembahasan.



# SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025–2029  
(Pasal 44 Permendagri 86 Tahun 2017)



## BAB I. PENDAHULUAN

**Memuat** Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

**Menyajikan dan menjelaskan** data dan informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis pembangunan yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah **(Periode Tahun 2019 - 2023)**.

## BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

**Menyajikan** gambaran kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan; **Menguraikan** perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas;

**Menggambarkan** kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan **(Periode Tahun 2019 - 2023)**.

## BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

**Permasalahan dan Isu strategis** merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD, karena menjadi dasar utama dalam penyusunan VISI dan MISI RPJMD.

- **Menyajikan** permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis;
- **Menjabarkan** isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional

## BAB V. PENUTUP



# 45 Indikator Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Perangkat Daerah Pengampu

1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1	Dinas Kesehatan
2	Kesehatan Ibu dan Anak:	2	Dinas Kesehatan
3	Penanganan Tuberkulosis:	3	Dinas Kesehatan
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%);	4	Dinas Kesehatan
5	Hasil Pembelajaran:	5	Dinas PK
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6	Dinas PK
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	7	Dinas PK
8	Tingkat Kemiskinan (%);	8	Bappeda
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%);	9	DPMPTSP dan Naker
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	10	Dinas Sosial

# 45 Indikator ...

11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

12 Pengembangan Pariwisata

13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama

14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD

15 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

17 Tingkat Penguasaan IPTEK:

18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

20 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/Kota

11 Bappeda

12 Disporapar

13 Disporapar

14 Disperindagkop , Bag. Ekonomi, BPKD

15 DPMTSP Naker

16 DPMTSP Naker

17 Bappeda

18 DLH & PUPR

19 Diskominfo

20 Disperindagkop



# 45 Indikator ...

- 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
- 22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
- 23 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
- 24 Indeks Reformasi Hukum
- 25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 26 Indeks Pelayanan Publik
- 27 Indeks Integritas
- 28 Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan
- 29 Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)
- 30 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilukada



- 21 Bappeda
- 22 Disperindagkop
- 23 Bappeda, PUPR, DPMG
- 24 Bag Hukum
- 25 Diskominfo
- 26 Bag Organisasi
- 27 Inspektorat
- 28 Bag Hukum
- 29 Satpol PP dan WH
- 30 Kesbangpol

# 45 Indikator ...

31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

32 Tingkat Inflasi (%)

33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

34 Inklusi Keuangan (%)

35 Indeks Pembangunan Syariat

36 Persentase dayah yang mandiri

37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

31 BPKD

32 Disperindagkop, DKPP

33 Bappeda, BPKD, Bag. Ekonomi

34 Bappeda, Bag Ekonomi

35 DSI-PD

36 DSI-PD

37 Dinas PK

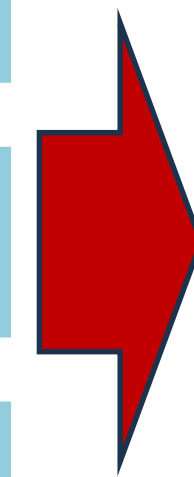
38 Kesbangpol

39 DP3AP2KB

40 DP3AP2KB

# 45 Indikator ...

- 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
- 42 Kualitas Lingkungan Hidup
- 43 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
- 44 Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)



- 41 DLH
- 42 DLH, PUPR
- 43 PUPR, DKP3
- 44 BPBD
- 45 DLH



# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029

## 1. Transformasi Sosial

### ➤ Kesehatan Untuk Semua

Indikator	Target Daerah	
	2024	2029
1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,95	75,88
2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	220	169
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28	20
3. Penanganan Tuberkulosis:		
a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100
b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	100
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100

### ➤ Perlindungan Sosial yang Adaptif

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Tingkat Kemiskinan (%)	10,58	8,08	Bappeda
2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	36,13	48,39	DPMPSTSP & Naker
3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	4,7	17,28	Dinsos

### ➤ Pendidikan Berkualitas yang Merata

Indikator	Target Daerah	
	2024	2029
1. Hasil Pembelajaran:		
a) Persentase Satuan Pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
- Literasi Membaca	64,84	69,63
- Numerasi	55,53	61,57
b) Persentase Satuan Pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
- Literasi Membaca	58,36	62,77
- Numerasi	39,5	47,13
c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,12	11,89
d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,69	16,27
2. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	28,13	28,43
3. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	56,62	61,22

## 2. Transformasi Ekonomi

### ➤ Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,45	20,24	Bappeda
2. Pengembangan Pariwisata			
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,20	2,39	Disporapar
b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	N/A	N/A	Disporapar
3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama	N/A	N/A	Disporapar
4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	6,08	9,59	Disperindagkop & UMKM
b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota (%)	1,54	2,21	Disperindagkop & UMKM
c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	6,92	7,25	Disperindagkop & UMKM
d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,15	1,99	Disperindagkop & UMKM
e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,06	1,25	Bag. Ekonomi
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,78	7,71	DPMPSTSP & Naker
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,33	52,05	DPMPSTSP & Naker
7. Tingkat Penguasaan IPTEK:			
a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBD	0,024	0,52	Bappeda
b) Peringkat Inovasi Daerah	83	68,50	Bappeda
c) Indeks Inovasi Daerah (IID)	10,6	22,95	Bappeda

### ➤ Penerapan Ekonomi Hijau

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	N/A	N/A	DLH
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A	N/A	Dinas PUPR

### ➤ Transformasi Digital

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indek Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	N/A	Diskominfo

### ➤ Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
a) Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap Nasional	0,05	0,06	Bappeda
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	70	77,50	Dinas PUPR
c1) Persentase Desa Mandiri	14,71	23,90	DPMG
c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,74	0,77	DPMG

### ➤ Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	Disperindagkop & UMKM
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	47,93	47,95	Bappeda
3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-12,10	-8,70	Disperindagkop & UMKM

### 3. Transformasi Tata Kelola

- **Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif**

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Reformasi Hukum	55,15	60,27	Bag. Hukum
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,54	2,41	Diskominfo
3. Indeks Pelayanan Publik	3,33	3,75	Bag. Organisasi
4. Indeks Integritas	69,45	74,59	Inspektorat

### 4. Transformasi Hukum, Stabilitas dan Implementasi Syariat Islam

- **Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan			
Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	N/A	N/A	Bag. Hukum
2. Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	85	87,50	Satpol PP & WH
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilukada	79,75	83,56	Kesbangpol

- **Stabilitas Ekonomi Makro**

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,86	1,00	BPKD
2. Tingkat Inflasi (%)	1,35-2,00	2,13	Bag. Ekonomi
3. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	24,53	33,20	BPKD
b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43	0,54	Bappeda
c) Nilai Transaksi Saham Per Kab/Kota Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	42,15	45,70	Bag. Ekonomi
d) Total Kredit/PDRB (%)	42,15	45,70	Bag. Ekonomi
4. Inklusi Keuangan (%)	94,91	95,95	Bag. Ekonomi

- **Syariat Islam**

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Pembangunan Syariat	82,84	85,54	DSI-PD
2. Persentase dayah yang mandiri	2,00	17,75	DSI-PD



## 5. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

### ➤ Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45-53-46	56,49	Dinas PK
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7-73,81	74,36	Kesbangpol

### ➤ Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
a) Ketahanan Energi			
- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1223	1783	Dinas PUPR
- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	N/A	N/A	Dinas PUPR
b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	6,09	5,07	DKPPP
c) Ketahanan Air			
-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,05	1,92	Dinas PUPR
-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32	49	Dinas PUPR

### ➤ Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,57	62,55	DP3AP2KB
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,345	0,33	DP3AP2KB

### ➤ Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	N/A	DLH
2. Kualitas Lingkungan Hidup			
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62,54	70,73	DLH
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	81,36	84,54	Dinas PUPR
c) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	0,0003	22,39	DLH
d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	2,79	27,09	DLH

### ➤ Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indikator	Target Daerah		OPD
	2024	2029	
1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	128,61	117,86	BPBD
2. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
a. Kumulatif	11,38	16,18	DLH
b. Tahunan	33,89	48,19	DLH

# REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029

## 1. Transformasi Sosial, dititikberatkan pada:

Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar;	Peningkatan kualitas SDM bidang Kesehatan;	Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;	Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok Masyarakat;	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan;	Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan Masyarakat;	Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan numerasi bagi seluruh peserta didik: dan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS.
--	--	---	---	--	--	--	---

## 2. Transformasi Ekonomi, dititikberatkan pada:

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan;

Pengembangan dan penguatan komoditas (jenis usaha) industri dengan ekspor bersih perdagangan;

Optimalisasi kemudahan investasi;

Peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (industri rumah tangga) dan industri kreatif;

Mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja;

Meningkatkan daya tarik dan promosi wisata; dan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi PAD dan retribusi daerah.



## 3. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada:

Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka Panjang;

Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;

Peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah;

Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP; dan

Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik pada seluruh instansi pemerintahan.

## 4. Mewujudkan Ketertiban Daerah dengan:

Penegakan hukum;

Stabilitas dan implementasi Syariat Islam difokuskan pada pengembangan budaya hukum, penegakan hukum yang adil;

Ketertiban Masyarakat;

Stabilitas ekonomi yang ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor;

Menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan;

Pemantapan pelaksanaan nilai Syariat Islam dengan memantapkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada Masyarakat: dan

Pendidikan keagamaan secara optimal.

## 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada

Penguatan Kelembagaan kesetaraan gender;

Penguatan kelembagaan kepengurusan anak;

Pembangunan dan pementapan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius dan melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan local;

Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana;

Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional;

Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

Peningkatan diversifikasi tanam;



# REKOMENDASI ...

## 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas dengan Fokus pada:

Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota;

Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman;

Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah;

Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman;

Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan

Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

## Kesinambungan Pembangunan:

Memastikan perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak jangka Panjang;

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.



● ● ●

# TERIMA KASIH

## ATAS PERHATIANNYA







# Link Paparan

<https://bit.ly/TEKNORPJMK25-29>

